

KONSEP DEKLARASI KENEGARAAN 2026

Menuju Pemulihan Kedaulatan Rakyat

Amsterdam, 21 April 2026

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa,
dan dengan kesadaran penuh sebagai bagian dari rakyat Indonesia,
pemilik sah kedaulatan negara,

Hari ini kita berdiri bukan sekadar di sebuah tempat,
melainkan di sebuah titik sejarah.

Di tempat ini, puluhan tahun yang lalu, kedaulatan atas Indonesia pernah
diserahkan.

Namun hari ini, kita dihadapkan pada pertanyaan yang lebih mendasar, “apakah
kedaulatan itu benar-benar kembali kepada rakyat?”

Kita menyadari bahwa Indonesia didirikan sebagai negara yang berdaulat di
tangan rakyat. Negara adalah milik rakyat, bukan milik pemerintah, bukan milik
kelompok, dan bukan milik kekuasaan.

Pemerintah hanyalah pelaksana mandat, bukan pemilik negara.

Namun dalam perjalanan sejarah, terjadi pergeseran yang tidak kecil, di mana
kedaulatan rakyat semakin menjauh dari praktik kekuasaan, struktur negara menjadi
kabur, dan hubungan antara rakyat dan negara tidak lagi utuh.

Hari ini, ada satu kenyataan yang tidak bisa lagi diabaikan, di mana rakyat
semakin sering merasa sendirian di negaranya sendiri.

Ketika berhadapan dengan kebijakan, aparat, atau kekuasaan, rakyat tidak
selalu memiliki tempat berlindung yang jelas.

Negara masih berdiri, tetapi kehadirannya belum sepenuhnya dirasakan sebagai
pelindung.

Atas dasar itu, kami menyatakan bahwa:

- kedaulatan rakyat harus kembali nyata, bukan hanya disebut.
- Negara harus kembali pada jati dirinya sebagai milik rakyat.
- Pemerintah harus kembali pada posisinya sebagai pelaksana, bukan pusat kekuasaan.
- Konstitusi harus menjadi cermin kehendak rakyat, bukan sekadar dokumen hukum yang jauh dari kehidupan nyata.

Pemulihan negara tidak cukup dilakukan dengan mengganti orang. Pemulihan negara harus dimulai dari memperbaiki fondasi.

Diperlukan penataan ulang, di antaranya:

1. hubungan antara rakyat dan negara,
2. struktur ketatanegaraan,
3. mekanisme pengawasan kekuasaan,
4. serta pemisahan yang jelas antara negara dan pemerintah.

Tanpa itu, krisis akan terus berulang dalam bentuk yang berbeda.

Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk kembali memahami hakikat negara.

Negara ini bukan milik kekuasaan.

Negara ini bukan milik partai.

Negara ini adalah milik rakyat.

Kesadaran inilah yang menjadi titik awal perubahan.

Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Indonesia tidak kekurangan kekuatan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk kembali pada prinsip dasar, yaitu negara untuk rakyat, oleh rakyat, dan milik rakyat.

Pada titik ini, arah bangsa tidak boleh dibiarkan kabur. Ketika struktur negara melemah dan kepercayaan publik menurun, yang paling berbahaya bukan hanya krisis kekuasaan, tetapi potensi perpecahan antar anak bangsa.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, situasi seperti ini menuntut adanya langkah kenegaraan yang jelas, tegas, dan menyeluruh.

Salah satu opsi yang secara konseptual dapat dipertimbangkan dalam kondisi luar biasa adalah **Dekrit Presiden** sebagai langkah korektif kenegaraan, yang bertujuan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat secara utuh, meluruskan kembali struktur negara, serta mencegah konflik horizontal di tengah masyarakat.

Namun yang lebih penting dari bentuk langkahnya adalah tujuannya, yaitu:

1. menjaga keutuhan bangsa,
2. melindungi rakyat,
3. dan mengembalikan negara kepada pemiliknya yang sah.

Kepemimpinan nasional dituntut untuk berani mengambil jalan yang benar, bukan sekadar jalan yang mudah.

Sebab sejarah tidak menilai siapa yang berkuasa, tetapi siapa yang mampu menjaga keutuhan bangsa.

Indonesia hanya akan tetap berdiri kuat jika rakyat kembali menjadi pusat, dan negara kembali menjadi pelindungnya.